

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 ini dapat tersusun. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2024 Dinas Sosial, Renja tahun 2024 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan triwulan IV, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Sungai Raya, Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag.,M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670808 199903 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	27
2.3. Sumber Daya Aparatur (SDA)	37
2.4. Kajian Atas Indikator Kinerja	38
2.5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	42
2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	61
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	61
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	86
BAB IV PENUTUP	92



DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra	9
Tabel 2. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	39
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	41
Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.....	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI..... 37



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Rancangan Renja SKPD berpedoman pada Renstra SKPD, Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Renja SKPD mengacu pada rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mengusung tema “Pemulihan dan Penanjakan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya”. Tema tersebut memiliki kata kunci penguatan SDM unggul dan pemulihan sosial ekonomi.

Selaras dengan mewujudkan SDM yang berdaya secara ekonomi, maka dalam urusan sosial erat kaitannya dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan terhadap PPKS/PMKS tersebut sesuai dengan dengan amanat undang-undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 Tahun 2009 bahwa Dinas Sosial menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan perannya tersebut Dinas Sosial perlu mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai Mitra Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Penyediaan data yang akurat menjadi hal yang penting dan mendasar bagi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Selain itu pengembangan pelayanan Dalam Balai menjadi prioritas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang



Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selain memprioritaskan Pelayanan Dalam Balai, Dinas Sosial juga masih melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Luar Balai dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Restorasi Sosial.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata



- Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun



- 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
29. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya
30. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 61)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial adalah untuk mengawali proses perencanaan penganggaran sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; bahwa Perangkat Daerah menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2021
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN



4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
5. BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi dana **Rp. 9.159.227.749,-** yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar **Rp. 8.816.214.685,-** atau **96,26 %** dan Belanja Modal **Rp. 343.013.064,-** atau **3,74 %**.



Tabel 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya s/d Tahun 2022**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Peringkat Daerah) Tahun 2020-2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Peringkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	83,33%



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	83,33%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian yang dibuat	2 Paket	1 Paket	0	0			1 Paket	50%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan yang di ikuti	6 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100%		6 Orang	100%
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	0	0	0	0	5 Orang	5 Orang	50%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	83,33%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%		12 Bulan	100%
		2 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	45%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		24 Bulan	100%



	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket					4 Paket	4 Paket	50%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		24 Bulan	100%
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket					4 Paket	4 Paket	50%
Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		24 Bulan	100%
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen					12 Dokumen	12 Dokumen	50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		24 Bulan	100%
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566 Laporan					283 Laporan	283 Laporan	100%
Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Penyediaan AC dan Kipas Angin	14 Unit	0	14 Unit	14 Unit	100%		14 Unit	100%



Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	50%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	99 Unit	33 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	9 Unit	68 Unit	68%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit yang Terpenuhi	1 Unit	1 Unit	0	0	100%		1 Unit	100%
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit					1 Unit	1 Unit	50%
Pengadaan Mebel	Jumlah Unit yang Terpenuhi	35 Unit	19 Unit	16 Unit	16 Unit	100%		35 Unit	100%
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit yang terpenuhi	12 Unit	0	6 Unit	6 Unit		0	6 Unit	50%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit yang Terpenuhi	17 Unit	13 Unit	4 Unit	4 Unit	100%		17 Unit	100%
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0	0	0	5 Unit	50%	50%



Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang Terpenuhi	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		24 Bulan	100%
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0	0	0	0	3 Unit	3 Unit	50%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara / di Rehabilitasi	3 Unit							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	24 Laporan	24 Laporan	50%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		24 Bulan	100%
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		24 Bulan	100%



	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24 Laporan	0		0	0	12 Laporan	12 Laporan	50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	88 unit	100%	100%	100%	100%	50%	50%	83,33%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	0	0			1 Unit	100%
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit					1 Unit	1 Unit	50%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan	0	12 Bulan	12 Bulan	100%		12 Bulan	100%



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023**

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	0	0	0	0	7 Unit	7 Unit	48%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan						100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	8 Unit	12 Bulan	8 Unit	8 Unit	100%		8 Unit	100%
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit					16 Unit	50%	50%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Komputer, Unit Personal Komputer	24 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%		24 Bulan	100%



	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit					5 Unit	5 unit	50%
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit					1 Unit	50%	50%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	80,33%	80,33%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	11 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		11 Dokumen	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	0	0	0	0	5 Dokumen	50%	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		2 Dokumen	100%



Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	50%	50%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%		5 Dokumen	100%
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	0	0	0	0	4 Laporan	50%	50%
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	50%	83%	83%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Bulan Pegawai yang Menerima Gaji	28 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan		28 Bulan	100%
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang	0	0	0	0	22 Orang	50%	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		2 Dokumen	100%



	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	50%	50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	14 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%		14 Dokumen	100%
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	50%	50%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	83%
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	83%



Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	40 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%		40 Orang	100%
	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	0	0	0	0	20 Orang	20 Orang	50%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Panti/Lembaga yang diberi Bantuan	69 Lembaga	0	21 Lembaga	21 Lembaga	100%	23 Lembaga	44 Lembaga	64%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	75%	100%	78%	78%	50%	67,66%	67,66%



Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	100%	112%	100%	115%	115%	50%	109%	109%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diLuar Panti Sosial	500 Orang	280 Orang	250 Orang	288 Orang	115%			113,6%
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	500 Orang	0	0	0	0	250 Orang	250 Orang	50%
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	120 Orang					60 Orang	60 Orang	50%
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu	240 Orang					120 Orang	120 Orang	50%



	Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota								
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100%	38%	100%	42%	100%	100%	60%	60%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	600 Orang	114 Orang	300 Orang	126 Orang	42%		240 Orang	40%
	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		0		0	300 Orang	300 Orang	50%



PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan Fakir Miskin	100%							
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	181.00 0 Orang	0	0%	0	0	100%	0%	0%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	325.04 1 Jiwa	292.229 Jiwa	62.000 Jiwa	161.006 Jiwa	259,6 9%		453.235 Jiwa	139,43 %
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	181.00 0 Orang	0	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	43 Kegiatan	13 Kegiatan	0	13 Kegiatan	100%		2 Kegiatan	65%
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	114.00 0 Keluarga	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.000 Keluarga					1.000 Keluarg a	1000 Keluarg a	33%



	Kewenangan Kabupaten/Kota								
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	3058%	100%	241,50%	100%	49,51%	1116%	1116%
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	812 Orang	24.837 Orang	200 Orang	483 Orang	241,50%	204 Orang	25.524 Orang	3143%
Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan untuk Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	400 Orang	24.837 Orang	200 Orang	483 Orang	241,50%		25.320 Orang	3118%
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	412 Orang	0	0	0	0	204 Orang	204 Orang	49,51%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%



Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	104 Orang	52 Orang	52 Orang	52 Orang	100%	52 Orang	104 Orang	100%
	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	104 Orang	0	0	0	0	52 Orang	52 Orang	50%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Makam Pahlawan	100%	55%	100%	100%				55%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam Pahlawan yang di data	9 Makam	5 Makam				0	5 Makam	55%
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	9 Makam	5 Makam				0	5 Makam	55%
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Makam Pahlawan	3 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	0	0	1 Laporan	33%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	472 Lembaga	150 Lembaga	102 Lembaga	81 Lembaga	79,41 %		231	48%



Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	268 Lembaga	150 Lembaga	102 Lembaga	81 Lembaga	79,41 %			48%
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	204 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	100%					100%	100%	100%
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	12 Orang					12 Orang	12 Orang	100%
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12 Orang					12 Orang	12 Orang	100%



ke Desa/Kelurahan Asal	Kewenangan Kabupaten/Kota								
---------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kubu Raya khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat, telah memberi kewenangan secara luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah termasuk Kabupaten Kubu Raya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan tanggungjawab tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur tugas pokok dan fungsi tiap-tiap bagian dan pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial mengacu pada Peraturan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan



Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Sosial.

Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, mempunyai **Tugas** penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mempunyai **Fungsi** yang meliputi :

- a. Penyusunan program kegiatan di bidang Sosial;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum di Bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial;
- f. Pembinaan unit pelaksana teknis Dinas Sosial;
- g. Pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Sosial; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
 - a. Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - c. Seksi Pembinaan Sosial dan Pelestarian Nilai Kepahlawanan
4. Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan Orang Terlantar
 - b. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana Alam



c. Seksi Tuna Sosial, Anak dan Korban Napza

5. Unit Pelaksana Teknis

6. Kelompok Jabatan Fungsional

B.1 Tupoksi Jabatan Struktural

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

I. KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Memimpin dan merumuskan program kerja pada Dinas Sosial dalam rangka mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan Penetapan Sasaran Strategis Dinas.
- b. Perumusan dan Pelaksanaann kebijakan teknis Dinas.
- c. Pelaksanaan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang Dinas
- d. Pengarahan pelaksanaan program kerja Dinas.
- e. Pengoordinasian Penyelenggaraan program bidang sosial.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

II. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Memimpin, merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien.



Fungsi :

- a. Merumuskan program kerja di Bagian TU kepegawaian, Perlengkapan dan Umum bagian renja dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan program kerja di Bagian TU kepegawaian, Perlengkapan dan Umum bagian renja dan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas
- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di sekretariat dinas meliputi umum dan kepegawaian, program, keuangan dan aset dan juga kegiatan bidang agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras dilingkungan Dinas
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bagian umum dan kepegawaian, Renja dan keuangan sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Dinas.
- g. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja sekretariat berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.

Sekretaris membawahi, membawahi :

- **SUB BAGIAN TU, KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN DAN UMUM**

Tugas :

Memimpin, merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien

Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum berdasarkan sasaran dan program Kerja Tahunan Dinas Sosial untuk pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas



masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan proses mutasi dan pensiun pegawai di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku guna dijadikan bahan pengusulan lebih lanjut.
- f. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan benar serta tertib administrasi.
- g. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas Sosial berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

III. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Tugas ;

Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial dalam rangka menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Fungsi ;

- a. Merumuskan program kerja di bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas



masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas

- c. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial meliputi urusan penanganan kemiskinan, pemberdayaan sosial, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.
- f. Menyiapkan rencana kerja dan strategi bidang pemberdayaan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melakukan pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat agar di peroleh kinerja yang optimal.

IV. KEPALA BIDANG PELAYANAN, BANTUAN DAN REHABILITASI SOSIAL.

Tugas :

Memimpin dan melaksanakan program operasional pada Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial dalam rangka menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Fungsi :

- a.** Merumuskan program kerja di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- b.** Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c.** Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan secara berkelanjutan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.
- d.** Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial meliputi urusan pelayanan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial agar pelaksanaan program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras.
- e.** Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial meliputi urusan pelayanan sosial, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku untuk diajukan kepada pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan.
- f.** Menyiapkan rencana kerja dan strategi dibidang Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial kepada seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan berdasarkan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas meliputi; Balita terlantar, Anak terlantar, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia telantar, Penyandang disabilitas, Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban trafficking, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), Korban bencana alam, Korban bencana social, Perempuan rawan sosial ekonomi, Keluarga bermasalah sosial psikologis, Keluarga penerima program keluarga harapan, Pengurusan perijinan dan rekomendasi



pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (RPJS), Peningkatan kapasitas SDM/LKS pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial sebagai mitra kerja pada Bidang RPJS.

- g.** Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program kerja bidang Pelayanan, Bantauan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan pimpinan.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai ASN dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Jenis Jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

VI. Perencana Ahli Muda

Tugas :

Melaksanakan jabatan fungsional tertentu meliputi kajian dan analisis keuangan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis keuangan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas telaksana secara efektif dan efisien.

Fungsi :

- a.** menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- b.** melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan
- c.** memformulasikan sajian untuk analisis
- d.** menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
- e.** menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek



- f. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan
- g. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- h. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif

VII. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pelayanan Bantuan dan Rehabilitasi Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

Fungsi :

- a. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- b. Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- c. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- d. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- e. Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- f. Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif dalam tim sebagai anggota.
- g. Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif sebagai peserta.

VIII. Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial

Tugas :

Melakukan kegiatan penyuluhan dan pembinaan untuk Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial sesuai dengan materi yang disampaikan agar perilaku kelembagaan sosial berubah menjadi lebih baik.

Fungsi :



- a. Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu, permasalahan dan atau program kesejahteraan sosial secara faktual yang akan disuluhkan daerah non rawan sosial.
- b. Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat peraga daerah non rawan sosial.
- c. Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- d. Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial sebagai peserta.
- e. Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- f. Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.
- g. Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota.

IX. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

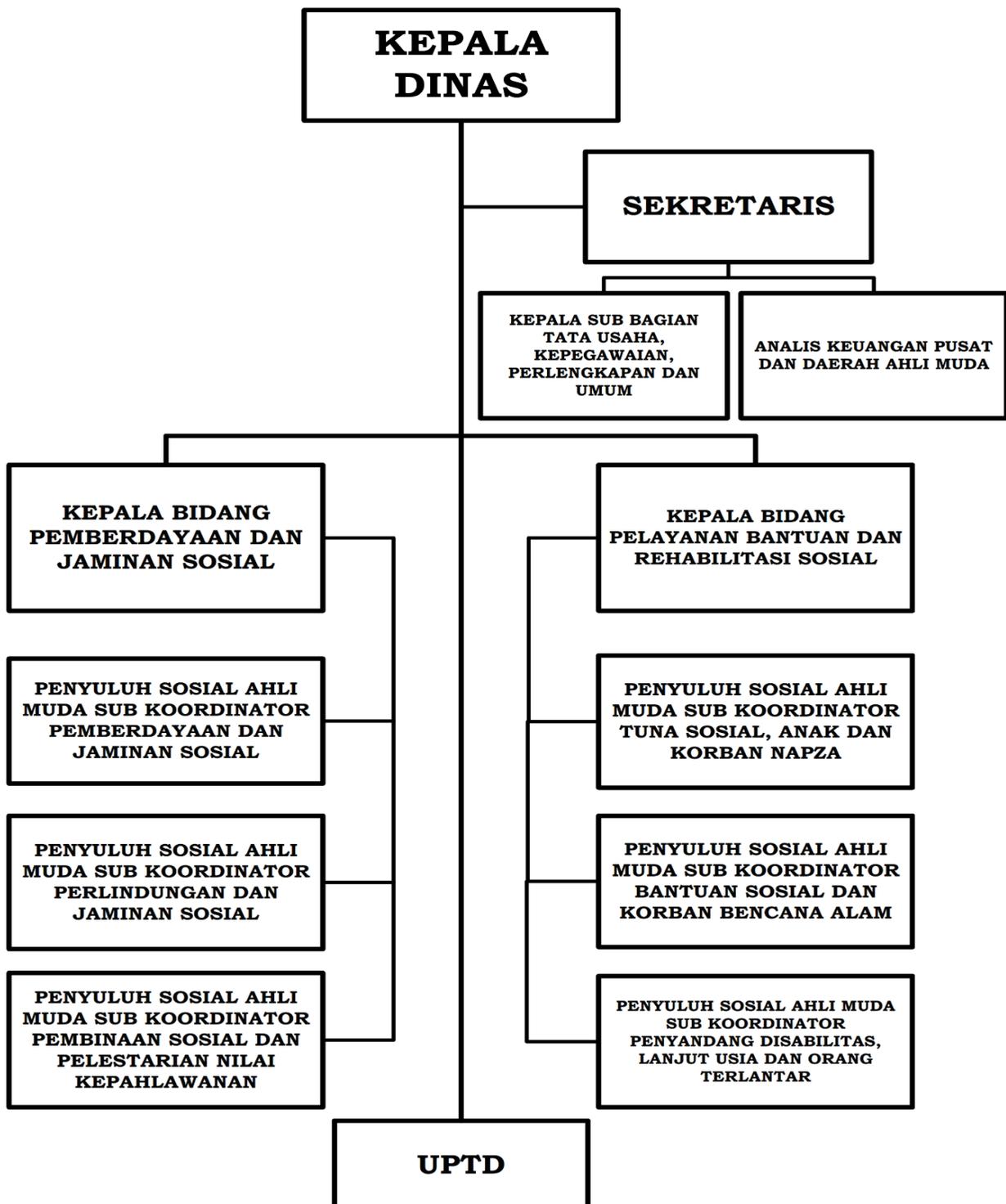
Unit pelaksan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Kualitas PNS di suatu SKPD sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

**Gambar 2. 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA**





2.4. Kajian Atas Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya 2009-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kubu Raya 2014 - 2019, RKPD, dan Draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase capaian program prioritas Kabupaten Kubu Raya dalam RPJMD. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Kubu Raya Dalam Angka, Profil Daerah, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kabupaten Kubu Raya dalam RPJMD.
- 2) Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya seperti pada table 2.2 berikut ini:



Tabel 2. 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase (%) Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	80%	100%	100%	100%	-	70%	84,43%	70%	75%	-
2	Persentase (%) Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	80%	50%	50%	100%	-	23%	73,08%	50%	50%	-
3	Persentase (%) Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Rehabilitas Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	80%	100%	100%	100%	-	100%	92%	85%	90%	-



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024**

4	Persentase (%) Gelandangan Pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti	Rehabilitas Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	80%	100	100%	-	-	100	86,67%	50%	50%	-
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	80%	100%	100%			89%	92%	70%	75%	-



**Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP	B (65)	B (70)	B (75)	A (80)	B (64)		B (70)	A (80)
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Reformasi Birokra Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS/PPKS	80%	85%	90%	100%	87%	84,67%	90%	100%



2.5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Sosial.

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan, antara lain:

- 1) Masih kurang akuratnya data PMKS.
- 2) Belum tersedianya panti rehabilitasi/rumah singgah/shelter untuk penampungan dan pembinaa para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk gelandangan pengemis, orang terlantar anak jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan di lapangan.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi PPKS.
- 2) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 3) Optimalisasi anggaran pembiayaan dalam mendukung pencapaian pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 4) Optimalisasi sumber daya manusia aparatur bidang pelayanan sosial.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- 1) Memiliki rencana strategis sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- 2) Memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Sosial mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu menjadikan Kabupaten Kubu Raya terdepan dan berkualitas.
- 4) Tersedianya dana untuk menunjang program dan kegiatan.

Sementara faktor-faktor di Dinas Sosial yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Dinas Sosial adalah:

- 1) Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis bidang sosial, pelatih dan tenaga teknis lainnya.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Belum optimalnya perencanaan anggaran.
- 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan dan belum optimalnya koordinasi antara bidang yang ada.

2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselarasi transformasi



sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kubu Raya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya membutuhkan sinergisitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergisitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dirasa masih belum bisa mengakomodir semua kegiatan.



**Tabel 2. 4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya**

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATA TAN PENT ING
					PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIA N	PAGU INDIKATO R	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIA N	KEBUTUH AN DANA	
1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	KKR	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 4.903.467.918	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	KKR	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 4.903.467.918	
1	6	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 68.819.673	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 68.819.673	
1	0	0	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 30.506.591	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 30.506.591	
1	0	0	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 18.417.945	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 18.417.945	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat	KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 19.895.137	Evaluasi Kinerja Perangkat	KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 19.895.137	
1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 3.085.696.311	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 3.085.696.311	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	Rp 3.012.825.375	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	Rp 3.012.825.375	
1	0	0	2.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 55.474.950	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp 55.474.950	
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 10.012.595	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 10.012.595	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 7.383.390	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 7.383.390	
1	0	0	2.	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Rp 15.019.211	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Rp 15.019.211	
1	0	0	2.	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KKR	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp 5.755.479	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KKR	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp 5.755.479	
1	0	0	2.	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 3.325.739	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Rp 3.325.739	
1	0	0	2.	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 5.937.994	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 5.937.994	
1	0	0	2.	01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 127.899.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Rp 127.899.000	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KKR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 68.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	KKR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 45.000.000	
1	0	0	2.	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Rp 59.899.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Rp 59.899.000	
1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 451.213.235	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKR	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 451.213.235	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 6.108.270	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 6.108.270	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp 25.373.459	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.373.459	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 93.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 150.000.000	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KKR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Rp 25.309.015	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KKR	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Rp 50.000.000	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KKR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 7.200.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KKR	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 7.200.000	
1	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283 Laporan	Rp 293.312.220	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283 Laporan	Rp 293.312.220	
1	0	0	2.	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Rp 36.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Rp 36.000.000	
1	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKR	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	31 Unit	Rp 474.091.058	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KKR	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	31 Unit	Rp 474.091.058	



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024**

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATA TAN PENT ING
					PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIA N	PAGU INDIKATO R	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIA N	KEBUTUH AN DANA	
1	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	Rp 180.000.00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	Rp 180.000.00 0	
1	0	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 36,805,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 36,805,000	
1	0	0	2.	0	Pengadaan Mebel	KKR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	Rp 41.895.636	Pengadaan Mebel	KKR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	103 Unit	Rp 71.000.000	
1	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 13.277.422	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 100.000.00 0	
1	0	0	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Rp 202.113.00 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Rp 198.150.00 0	
1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKR	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	Rp 508,595,00 0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKR	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	Rp 508,595,00 0	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 66.904.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 66.904.000	
1	0	0	2.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 476.976.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 476.976.000	
1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKR	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	17 Unit	Rp 162,392,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKR	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	17 Unit	Rp 162,392,600	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Rp 31.785.750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Rp 31.785.750	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp 50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp 50.000.000	
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp 14.932.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKR	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 15.000.000	
1	0	0	2.	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KKR	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Rp 25.238.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KKR	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Rp 25.238.000	
1	0	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	Rp 14.892.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp 14.892.000	
1	0	0	2.	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING	
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA		
1	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	KKR	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial	100%	Rp 107.513.365	PROGRAM PEMB ERDAYAAN SOSIAL	KKR	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial	100%	Rp 107.513.365		
1	0	0	2.	03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2 Kegiatan	Rp 41.199.770	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2 Kegiatan	Rp 41.199.770		
1	0	0	2.	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 30.789.268	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 30.789.268	
1	0	0	2.	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Lembaga	Rp 10.410.501	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Lembaga	Rp 100.000.000	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	KKR	Persentase Warga Negara Korban Kekerasan Ditangani yang Migran Tindak yang	13 Orang	Rp 15.300.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	KKR	Persentase Warga Negara Korban Kekerasan Ditangani yang Migran Tindak yang	13 Orang	Rp 15.300.000	
1	0	0	2.		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	KKR	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	13 Orang	Rp 15.300.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	KKR	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	13 Orang	Rp 15.300.000	
1	0	0	2.	0	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	KKR	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	Rp 15.300.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	KKR	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang	Rp 15.300.000	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	KKR	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	Rp 444.407.514	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	KKR	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	Rp 444.407.514	
1	0	0	2.	01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	KKR	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	250 Orang	Rp 166.576.649	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	KKR	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	250 Orang	Rp 166.576.649	
1	0	0	2.	01	Penyediaan Permakanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Rp 54.477.378	Penyediaan Permakanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Rp 54.477.378	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0	2.	0	Penyediaan Alat Bantu	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	Rp 157.608.756	Penyediaan Alat Bantu	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	Rp 157.608.756	
1	0	0	2.	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	KKR	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Rp 166.576.649	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	KKR	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	Rp 166.576.649	
1	0	0	2.	0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	KKR	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100%	Rp 65.744.731	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	KKR	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	100%	Rp 65.744.731	



Kode	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATA TAN PENT ING
	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAI AN	PAGU INDIKATO R	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAI AN	KEBUTUH AN DANA	
1 0 6 4 02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	KKR	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Rp 65.744.73	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	KKR	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	Rp 65.744.73	
1 0 6 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KKR	Persentase Penanganan Fakir Miskin	100%	Rp 695.643.88 6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KKR	Persentase Penanganan Fakir Miskin	100%	Rp 695.643.88 6	
1 0 6 5 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	59.000 Orang	Rp 695.643.88 6	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	59.000 Orang	Rp 695.643.88 6	
1 0 6 5 02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	59.000 Orang	Rp 124.248.74 8	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	10.000 Orang	Rp 124.248.74 8	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	0	0	2	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KKR	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	38.000 Keluarga	Rp 112.912.427	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KKR	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	21.000 Keluarga	Rp 112.912.427	
1	0	0	2	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KKR	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000 Keluarga	Rp 458.482.711	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KKR	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000 Keluarga	Rp 458.482.711	
1	0	0			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	KKR	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	Rp 135.626.930	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	KKR	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	Rp 135.626.930	
1	0	0	2	0	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	208 Orang	Rp 84.908.239	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	208 Orang	Rp 84.908.239	
1	0	0	2	0	Penyediaan Makanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	208 Orang	Rp 84.908.239	Penyediaan Makanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	208 Orang	Rp 84.908.239	



Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATA TAN PENT ING	
					PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIA N	PAGU INDIKATO R	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGE T CAPAIA N	KEBUTUH AN DANA		
1	0	0	2.		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2 Kali	Rp 50.718.690	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2 Kali	Rp 50.718.690		
1	0	0	2.	0	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	KKR	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	Rp 50.718.690	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	KKR	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	52 Orang	Rp 50.718.690		
TOTAL										Rp 6.270.734. 865	TOTAL					Rp 6.657.122. 914



2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa Stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD Kabupaten lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Dinas Sosial sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Dinas Sosial didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Sosial adalah Peningkatan kualitas Sosial melalui peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Sosial dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Sebagaimana dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa terdapat 3 masalah pokok bangsa beserta tantangan utama pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

INDONESIA BERPENGHASILAN MENENGAH - TINGGI YANG SEJAHTERA, ADIL, DAN BERKESINAMBUNGAN

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang dititikberatkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, serta pembangunan etos kerja.
- 5) Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 adalah tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN ke-4 (2020-2024) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang berkualitas, dan pembangunan perumahan dan pemukiman.

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutam dengan pembangunan konektivitas laut dan industri maritime, pengembangan kawasan pariwisata dan percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK).

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agrarian.

4. Pembangunan politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Prioritas pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan diarahkan untuk konsolidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hukum, reformasi birokrasi.

5. Pembangunan Ekonomi

Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.

B. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur yang bersinergi dengan visi, misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara umum materi RPJMD berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan program kepala daerah.



Mengacu pada RPJMD Propinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, maka visi Kepala Daerah adalah :

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Penentuan prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Kubu Raya harus menyesuaikan dengan prioritas pembangunan Propinsi Kalimantan Barat dengan pertimbangan adanya persamaan kepentingan atau tujuan strategis yang harus disinergiskan, adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama, dan adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama serta adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kabupaten Kubu Raya adalah

”Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius”.

Visi Pembangunan Jangka Menengah tersebut dapat dijelaskan bahwa :

Bahagia, adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu.

Bermartabat, adalah kondisi yang menggambarkan meningkatnya harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya.



Terdepan, adalah kondisi yang menggambarkan masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

Berkualitas, adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Religius, adalah kondisi yang menggambarkan Kabupaten Kubu Raya yang mengembangkan karakter Sumber Daya Manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan Peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 4 (Empat) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance);
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal;



4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat;
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Dinas Sosial melaksanakan urusan yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar, sehingga program dan kegiatan di Dinas Sosial mendukung misi 2 Kabupaten Kubu Raya. Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Sosial maka tujuan, sasaran dan indikator sasaran rencana kerja Dinas Sosial tahun 2023 adalah :

TABEL 3. 1

Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	MENINGKATNYA KEPUASAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	MENINGKATNYA PENANGANAN PMKS	PERESENTASE PENANGANAN PMKS/PPKS	85%
2	MENINGKATNYA AKUNTANBILITAS DAN KEUANGAN	MENINGKATKAN NILAI SAKIP PADA UNIT KERJA	NILAI SAKIP	B (75)



TABEL 3. 2
Program dan Kegiatan Tahun 2023

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Pemberdayaan Sosial	
	1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Rehabilitasi Sosial	
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial.
	2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Napza diluar panti sosial
4.	Program Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
5.	Program Penanganan Bencana	
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota
	2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
6.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
	1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota
7.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	1.	Fasilitasi Pengelolaan Binas Mental Spritual
8.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	



	1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal
--	----	--

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Dinas Sosial Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 secara detail dapat dilihat pada table berikut:



**TABEL 3. 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2023 DAN PERLIRAAN MAJU TAHUN 2024 KABUPATEN KUBU RAYA**

SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024	
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINS OS KKR	100%	Rp 4.429.902.093	APBD KKR	100%	Rp 4.837.435.893
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINS OS KKR	100%	Rp 67.471.160	APBD KKR	100%	Rp 75.400.000
1, 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINS OS KKR	4 Dokumen	Rp 29.908.760	APBD KKR	5 Dokumen	Rp 32.600.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024		
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1, 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINS OS KKR	2 Laporan	Rp 18.057.120	APBD KKR	2 Laporan	Rp 20.000.000
1, 3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINS OS KKR	4 Laporan	Rp 19.505.280	APBD KKR	4 Laporan	Rp 22.800.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DINS OS KKR	100%	Rp 2.996.887.733	APBD KKR	100%	Rp 3.234.576.893
2, 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DINS OS KKR	23 Orang/Bu lan	Rp 2.925.444.573	APBD KKR	23 Orang/Bula n	Rp 3.067.688.813
2, 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DINS OS KKR	12 Dokumen	Rp 54.388.080	APBD KKR	12 Dokumen	Rp 147.388.080



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024		
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2, 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DINS OS KKR	1 Laporan	Rp 9.816.320	APBD KKR	1 Laporan	Rp 11.000.000
2, 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/TriwulananSeme steran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	DINS OS KKR	12 Laporan	Rp 7.238.760	APBD KKR	12 Laporan	Rp 8.500.000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	DINS OS KKR	100%	Rp 14.730.600	APBD KKR	100%	Rp 18.360.000
3, 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	DINS OS KKR	1 Dokumen	Rp 5.646.000	APBD KKR	1 Dokumen	Rp 6.120.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024		
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
3, 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DINS OS KKR	1 Dokumen	Rp 3.261.000	APBD KKR	1 Dokumen	Rp 6.120.000
3, 3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DINS OS KKR	1 Laporan	Rp 5.823.600	APBD KKR	1 Laporan	Rp 6.120.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DINS OS KKR	100%	Rp 42.785.000	APBD KKR	100%	Rp 59.899.000
4, 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	DINS OS KKR	5 Orang	Rp 42.785.000	APBD KKR	5 Orang	Rp 59.899.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024		
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DINS OS KKR	100%	Rp 417.772.000	APBD KKR	100%	Rp 431.500.000	
5, 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DINS OS KKR	1 Paket	Rp 6.000.000	APBD KKR	1 Paket	Rp 6.000.000
5, 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DINS OS KKR	1 Paket	Rp -	APBD KKR	0%	Rp -
5, 3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DINS OS KKR	4 Paket	Rp 92.070.000	APBD KKR	4 Paket	Rp 93.000.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024		
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5, 4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DINS OS KKR	4 Paket	Rp 24.818.000	APBD KKR	4 Paket	Rp 25.000.000
5, 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	DINS OS KKR	1 Dokumen	Rp 7.200.000	APBD KKR	1 Dokumen	Rp 7.500.000
5, 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINS OS KKR	1 Laporan	Rp 287.684.000	APBD KKR	1 laporan	Rp 300.000.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	DINS OS KKR	8 Unit	Rp 212.068.000	APBD KKR	16 Unit	Rp 338.300.000
6, 1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DINS OS KKR	2 Unit	Rp 13.768.000	APBD KKR	13 Unit	Rp 140.000.000



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023**

SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024		
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
6, 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DINS OS KKR	3 Unit	Rp 198.300.000	APBD KKR	3 Unit	Rp 198.300.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINS OS KKR	86 Kali	Rp 515.795.000	APBD KKR	86 Kali	Rp 515.600.000
7, 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DINS OS KKR	12 Laporan	Rp 41.904.000	APBD KKR	12 Laporan	Rp 45.600.000
7, 2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DINS OS KKR	12 Laporan	Rp 473.891.000	APBD KKR	12 Laporan	Rp 470.000.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024	
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DINS OS KKR	56 Unit	Rp 162.392.600	APBD KKR	56 Unit	Rp 163.800.000
8, 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINS OS KKR	8 Unit	Rp 33.352.600	APBD KKR	8 Unit	Rp 34.000.000
8, 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DINS OS KKR	3 Unit	Rp 75.000.000	APBD KKR	3 Unit	Rp 75.000.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024		
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
8, 3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DINS OS KKR	24 Unit	Rp 14.640.000	APBD KKR	24 Unit	Rp 15.000.000
8, 4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	DINS OS KKR	1 Unit	Rp 24.800.000	APBD KKR	1 Unit	Rp 24.800.000
8, 5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DINS OS KKR	20 Unit	Rp 14.600.000	APBD KKR	20 Unit	Rp 15.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Layanan Kesejahteraan Sosial	DINS OS KKR	100%	Rp 40.398.690	APBD KKR	100%	Rp 107.513.365
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	DINS OS KKR	2 Kegiatan	Rp 40.398.690	APBD KKR	5 Dokumen	Rp 107.513.365



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024	
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1, 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	20 Orang	Rp 30.189.650	APBD KKR	2 Laporan	Rp 72.825.347
1, 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	23 Lembaga	Rp 10.209.040	APBD KKR	4 Laporan	Rp 34.688.018
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	DINS OS KKR	12 Orang	Rp 10.388.340	APBD KKR	13 Orang	Rp 22.000.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024	
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DINS OS KKR	12 Orang	Rp 10.388.340	APBD KKR	13 Orang	Rp 22.000.000
1, 1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DINS OS KKR	12 Orang	Rp 10.388.340	APBD KKR	13 Orang	22.000.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINS OS KKR	100%	Rp 435.696.360	APBD KKR	13 Orang	Rp 1.015.558.659



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024	
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	DINS OS KKR	100%	Rp 371.240.560	APBD KKR	13 Orang	Rp 885.558.659
1, 1	Penyediaan Permakanan	DINS OS KKR	60 Orang	Rp 53.409.260	APBD KKR	60 Orang	Rp 72.000.000
1, 2	Penyediaan Alat Bantu	DINS OS KKR	76 Orang	Rp 154.518.460	APBD KKR	76 Orang	Rp 300.000.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024		
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1, 3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	250 Orang	Rp 163.312.840	APBD KKR	250 Orang	Rp 513.558.659
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DINS OS KKR	100%	Rp 64.455.800	APBD KKR	100%	Rp 130.000.000
2, 1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	300 Orang	Rp 64.455.800	APBD KKR	300 Orang	Rp 130.000.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024	
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan Fakir Miskin	DINS OS KKR	100%	Rp 682.004.318	APBD KKR	13 Orang	Rp 1.172.776.638
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	60.000 Orang	Rp 682.004.318	APBD KKR	59.000 Orang	Rp 1.172.776.638
1, 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	295.459 Orang	Rp 121.812.600	APBD KKR	59.000 Orang	Rp 222.776.638
1, 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	DINS OS KKR	2.000 Keluarga	Rp 110.698.639	APBD KKR	38.000 Keluarga	Rp 300.000.000
1, 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINS OS KKR	18.000 Keluarga	Rp 449.493.079	APBD KKR	18.000 Keluarga	Rp 650.000.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024	
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	DINS OS KKR	100%	Rp 132.968.200	APBD KKR	100%	Rp 284.642.697
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	204 Orang	Rp 83.243.780	APBD KKR	204 Orang	Rp 189.642.697
1, 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	204 Orang	Rp 83.243.780	APBD KKR	204 Orang 189.642.697
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	2 Kali	Rp 49.724.420	APBD KKR	2 Kali Rp 95.000.000



SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024		
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
2, 1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	52 Orang	Rp 49.724.420	APBD KKR	52 Orang	Rp 95.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	DINS OS KKR	100%	Rp 26.499.980	APBD KKR	100%	Rp 28.000.000
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makan Pahlawan yang di Data	DINS OS KKR	1 Laporan	Rp 26.499.980	APBD KKR	1 Laporan	Rp 28.000.000
1, 1	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	DINS OS KKR	1 Laporan	Rp 26.499.980	APBD KKR	1 Laporan	28.000.000



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023**

SKPD/URUSAN/BIDAN G/ PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Perkiraan Tahun 2024	
		Lokas i	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	DINS OS KKR	102 Dokumen	Rp 1.715.169.420	APBD KKR	102 Dokumen	Rp 2.524.648.477
1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	DINS OS KKR	102 Dokumen	Rp 1.715.169.420	APBD KKR	102 Dokumen	Rp 2.524.648.477
1, 1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	DINS OS KKR	102 Dokumen	Rp 1.715.169.420	APBD KKR	102 Dokumen	Rp 2.524.648.477
TOTAL				Rp 7.473.027.401	TOTAL		Rp 9.992.575.729



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TABEL 4. 1
Alokasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2023 Kabupaten Kubu Raya

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 4.429.902.093	APBD
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 67.471.160	APBD
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 29.908.760	APBD
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 18.057.120	APBD
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.505.280	APBD
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.996.887.733	APBD
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.925.444.573	APBD
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 54.388.080	APBD
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 9.816.320	APBD
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 7.238.760	APBD



KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 14.730.600	APBD
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 5.646.000	APBD
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 3.261.000	APBD
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 5.823.600	APBD
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 42.785.000	APBD
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 42.785.000	APBD
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 417.772.000	APBD
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.000.000	APBD
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 92.070.000	APBD
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.818.000	APBD
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 7.200.000	APBD
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 287.684.000	APBD
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 212.068.000	APBD
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 13.768.000	APBD
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 198.300.000	APBD



KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 515.795.000	APBD
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 41.904.000	APBD
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 473.891.000	APBD
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 162.392.600	APBD
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 33.352.600	APBD
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 75.000.000	APBD
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 14.640.000	APBD
1	06	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp 24.800.000	APBD
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 14.600.000	APBD
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 40.398.690	APBD



KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.398.690	APBD
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 30.189.650	APBD
1	06	02	2,03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 10.209.040	APBD
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp 10.388.340	APBD
1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp 10.388.340	APBD
1	06	03	2,01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp 10.388.340	APBD
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 435.696.360	APBD
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 371.240.560	APBD
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Rp 53.409.260	APBD
1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Rp 154.518.460	APBD
1	06	04	2,01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp 163.312.840	APBD



KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 64.455.800	APBD
1	06	04	2,02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp 64.455.800	APBD
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 682.004.318	APBD
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 682.004.318	APBD
1	06	05	2,02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 121.812.600	APBD
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 110.698.639	APBD
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 449.493.079	APBD
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 132.968.200	APBD
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 83.243.780	APBD
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Rp 83.243.780	APBD
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 49.724.420	APBD
1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 49.724.420	APBD
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp 26.499.980	APBD



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023**

KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 26.499.980	APBD
1	06	07	2,01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 26.499.980	APBD
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 1.715.169.420	APBD
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 1.715.169.420	APBD
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 1.715.169.420	APBD
TOTAL ANGGARAN						Rp 7.473.027.401	APBD

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2023. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum dan Dinas Sosial secara khusus maka Renja Dinas Sosial disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya.

Substansi Renja Dinas Sosial disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu di perhatikan, antara lain :

1. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Dinas Sosial pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *Service Excellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Alokasi APBD Kabupaten Kubu Raya untuk Dinas Sosial selama ini dirasa belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, hal ini di karenakan luasnya wilayah Kabupaten Kubu Raya.
3. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
4. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Sosial, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.



Kinerja Dinas Sosial pada tahun 2023 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Rencanan Kerja Dinas Sosial ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan Sosial dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian dokumen Rencanan Kerja Dinas Sosial ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wakilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19670808 199903 1 010